

Editor: Lukman Yudho Prakoso, Muhammad Ikmal Setiadi, Rianto

MENGAMANKAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA II



Tim Penulis:

Andike Sry Mutia, Jonni Mahroza, Aries Sudiarso,
Gentio Harsono, Buddy Suseto, Achmed Sukendro

MENGAMANKAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA II

Tim Penulis:

Andike Sry Mutia, Jonni Mahroza, Aries Sudiarso,
Gentio Harsono, Buddy Suseto, Achmed Sukendro



MENGAMANKAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA II

Tim Penulis:

**Andike Sry Mutia, Jonni Mahroza, Aries Sudiarso,
Gentio Harsono, Buddy Suseto, Achmed Sukendro**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

**Lukman Yudho Prakoso
Muhammad Ikmal Setiadi
Rianto**

ISBN:

**978-623-459-938-1
978-623-459-939-8 (PDF)**

Cetakan Pertama:

Januari, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengesahkan rencana pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Salah satu implikasinya adalah diperlukan strategi pertahanan dalam rangka melindungi Ibu Kota Nusantara tersebut. Mengingat adanya pemindahan *Centre of Gravity*, potensi ancaman di IKN, serta kondisi kemampuan kekuatan TNI itu sendiri. Masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana strategi gelar operasi TNI di ALKI II berdasarkan UU IKN No.3 tahun 2022 dalam rangka pertahanan maritim guna menegakkan kedaulatan NKRI.

Diperlukan strategi pertahanan dalam rangka melindungi Ibu Kota Nusantara tersebut. Di era modern seperti sekarang ini, perlindungan kota dikaji melalui konsep fortifikasi yang meliputi dua faktor, yakni: pertama, pertahanan di masa damai sama dengan di masa perang. Kedua, kota harus dipertahankan seluruhnya karena mengandung segitiga fungsi ekonomi, pemerintahan dan pertahanan.

Akhirnya buku ini semoga dapat memberikan kemanfaatan untuk para pembaca yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2024
Kapus Jurnal dan Publikasi, LPPM, Unhan RI

Kolonel Laut (E) Dr. Ir. Lukman Yudho Prakoso., SIP., MAP., CIQaR., M.Tr.
Opsla., IPU., ASEAN Eng

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Nama:
ABK	Anak Buah Kapal
AIS	<i>Automatic Identification System</i>
ALKI II	Alur Laut Kepulauan Indonesia II
Baharkam	Badan Pemelihara Keamanan
Bakamla RI	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
BT	Bujur Timur
CCRF	<i>Code of Conduct for Responsible Fisheries</i>
COG	<i>Center of Gravity</i>
Dirjen	Direktur Jenderal
Ditpolair	Direktorat Kepolisian Perairan
EAS	<i>East Asia Summit</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
GT	<i>Gross Tonnage</i>
IUU	<i>Illegal Unreported Unregulated</i>
IPOA	<i>International Plan of Action</i>
JTB	Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan
Kakorpolairud	Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara
KIA	Kapal Ikan Asing
KII	Kapal Ikan Indonesia
KM ²	Kilo Meter persegi
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP	Kapal Polisi
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LU	Lintang Utara
MOU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
Nm	Nautical Mile
No.	Nomor
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Permen	Peraturan Menteri
Perkap	Peraturan Kapolri
PMD	Poros Maritim Dunia
Polair	Kepolisian Perairan
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PSDKP	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
Pusdatin	Pusat Data dan Teknologi Informasi
	Pendidikan dan Kebudayaan
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SOP	<i>Standart Of Procedure</i>
SOTK	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekjen	Sekretaris Jenderal
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UNCLOS	<i>United Nations Convention on The Law of The Sea</i>
UU	Undang-Undang
VMS	<i>Vessel Monitoring System</i>
VTMS	<i>Vessel Traffic Monitoring System</i>
WPP-RI	Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
ZEEI	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Gelar Pasukan dan Pembangunan Kekuatan Militer	9
BAB 3 Ancaman Pertahanan dan Keamanan di Wilayah ALKI II	13
BAB 4 Gelar Operasi TNI di ALKI II Guna Mendukung Pertahanan Maritim Ibu Kota Nusantara	21
BAB 5 Kondisi Eksisting Gelar Kekuatan TNI AL di ALKI II	27
BAB 6 Strategi Gelar Kekuatan TNI AL di ALKI II Guna Mendukung Pertahanan Maritim di Ibu Kota Negara	49
DAFTAR PUSTAKA	82



PENDAHULUAN

Pada tanggal 18 Januari 2022, rencana pemindahan Ibukota Negara disahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 dijelaskan bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa. Paradigma perencanaan dan prinsip pengembangan IKN disusun menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan di lokasi yang baru.

Secara umum ada beberapa faktor penting yang apabila tidak di kelola dan dipertimbangkan secara baik dapat menjadi suatu ancaman bagi kedaulatan dan keutuhan NKRI dalam pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah provinsi Kalimantan Timur tersebut, yaitu:

- a. Mendekati garis perbatasan darat dengan Malaysia sepanjang 2.062 km.
- b. Mendekati batas wilayah laut Malaysia.
- c. Berada diantara jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II.
- d. Berada dekat dengan Flight Information Region (FIR) negara tetangga (Singapura FIR, Kinabalu FIR dan Manila FIR).
- e. Mendekati lokasi gelar kekuatan militer negara tetangga dan kawasan (Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Vietnam, China dan US Indopacom).



GELAR PASUKAN DAN PEMBANGUNAN KEKUATAN MILITER

Stephen Biddle dalam bukunya *Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle* menyebutkan bahwa penggelaran atau *force deployment* memegang peranan penting ketimbang teknologi maupun *preponderance* pada saat sekarang. Dilihat dari kutipan tersebut diatas yang menjadi permasalahan kemudian adalah bagaimana penggelaran (*force deployment*) tersebut ditugaskan sesuai dengan strategi yang dijalankan. Tentunya hal ini bergantung kepada rumusan strategi pertahanan yang sesuai untuk menghadapi karakteristik yang berbeda dari setiap ancaman.

Dalam teori penggelaran (*force deployment*) dijelaskan bahwa strategi gelar kekuatan akan menentukan apakah gelar kekuatan yang dilakukan bersifat ofensif atau defensif (Helmi, 2011). Teori ini menjelaskan bahwa gelar kekuatan akan dipengaruhi oleh operasi dan taktik yang dirumuskan dalam menghadapi karakteristik ancaman yang berbeda.

Gelar kekuatan TNI diwujudkan melalui penggelaran alutsista TNI di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia yang dapat memberikan efek penangkalan (*deterrence effect*). Dimana efek penangkal tersebut sangat bergantung kepada ketepatan penggelaran kekuatan TNI di wilayah yang strategis, baik berupa alutsista, sarana prasarana pendukung serta lokasi gelar kekuatan TNI.

Henry C. Bartlett, seorang pakar militer, karyanya "*Force Planning Approaches*" menyebutkan empat aspek perencanaan pembangunan kekuatan militer, *the four pillars of total combat capability*, yaitu (Henry C., 1990):



ANCAMAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI WILAYAH ALKI II

Posisi IKN yang berbatasan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan *choke point* atau titik sempit dunia. Sedangkan di sisi udara, lokasi IKN mendekati *Flight Information Region* (FIR) milik negara tetangga, seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina. Selain itu, ibu kota negara baru ada dalam radius jelajah ICBM (*intercontinental ballistic missile*) dan rudal hipersonik negara tertentu. Ancaman lainnya adalah saat ini pulau Kalimantan merupakan lokasi dan jalur *trans-nation crime*, seperti penyelundupan orang, narkoba, dan sebagainya. IKN juga berdekatan dengan *terrorist transit triangle* di Sulu, Sabah, dan Poso. Kemudian, posisi ibu kota negara baru dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti FPDA (*The Five Power Defence Arrangements*) Malaysia dan sebagainya, kemudian Aliansi AUKUS Australia, UK, dan USA, dan terdampak dari *one belt one road* atau OBOR BRI China (cnbcindonesia.com, 2023).



GELAR OPERASI TNI DI ALKI II GUNA Mendukung PERTAHANAN MARITIM IBU Kota NUSANTARA

Ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional menjadi sebuah tantangan bagi TNI AL sebagai penegak hukum di laut yang dituntut untuk mampu memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal asing yang melintas di wilayah ALKI II. TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut berpegang pada doktrin sebagai landasan strategi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini untuk menghadapi ancaman terhadap aspek kelautan dan menciptakan situasi laut yang aman terkendali di wilayah yurisdiksi nasional.

Implementasi hak dan kewajiban ALKI ini bertujuan untuk menciptakan *good order at sea*, sebagaimana disampaikan oleh Till mengutip *The Royal Navy* “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak militer melalui kerja sama dengan institusi-institusi pemerintahan lainnya, agensi-agensi dan mitra-mitra internasional dalam lingkungan maritim untuk mengatasi kegiatan ilegal dan mendukung kebebasan di laut, dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan internasional. Indonesia memiliki hak dan kewajiban menjaga keamanan pelayaran kapal-kapal asing yang melintas di ALKI (Suryawan *et al.*, 2021).

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AL memiliki tugas untuk:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi;



KONDISI EKSISTING GELAR KEKUATAN TNI AL DI ALKI II

Sistem pengamanan di kawasan ALKI II saat ini dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah diantaranya Kogabwilhan II sebagai Kotama Operasional Mabes TNI, Bakamla, TNI AL dan TNI AU dengan menggelar operasi sesuai kewenangan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing – masing instansi. Dengan dukungan dari sarana dan prasarana yang ada di sepanjang wilayah ALKI II yang dimiliki oleh Instansi pemerintah, BUMN dan TNI. Untuk mewujudkan jaminan keamanan tersebut perlu dibangun suatu konsep pengamanan ALKI II yang meliputi operasi terpadu, kedua, peningkatan sarana dan prasarana pendukung. dan pembentukan organisasi yang secara khusus menangani pengamanan dil ALKI II.

Dalam rangka menjamin keamanan maritim di kawasan ALKI II, TNI melaksanakan operasi Garda Samudera-21 yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Panglima Koarmada II sebagai Pangkogasgab Pam ALKI II yang merupakan kegiatan operasi dibawah Mabes TNI yang dilaksanakan sepanjang tahun. Selanjutnya, Pabandya-1/Siapopsdagri Paban IV/Opsdagri Sops TNI menambahkan terkait Sarana dan Prasarana TNI yang meliputi area tugas ALKI II. ALKI II terletak di antara pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi di sisi utara mulai Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. Disepanjang ALKI II terdapat beberapa sarana TNI yang sudah tergelar. Dalam pelaksanaan operasi pengamanan di ALKI II personel dan material TNI yang dikerahkan antara lain (2023):



STRATEGI GELAR KEKUATAN TNI AL DI ALKI II GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN MARITIM DI IBU KOTA NEGARA

Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas alutsista aparat membuat tingkat ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan wilayah di sekitar ALKI II menjadi tinggi. Sementara, upaya mengatasinya melalui latihan dan operasi kerjasama di lapangan bukannya tidak membawa resiko. Karena, mengundang keterlibatan asing dalam latihan bersama sesering mungkin, untuk masuk jauh ke wilayah perairan Kepulauan Indonesia, di luar jalur ALKI yang disediakan, semakin memberikan kesempatan pihak asing untuk melakukan pengintaian dan pendataan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tidak langsung. Kondisi saat ini yang berkembang menunjukkan eksistensi ALKI II dan prospek ancamannya, serta upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, membutuhkan personel keamanan yang profesional dan memiliki dedikasi dan kemampuan yang tinggi dalam bertugas. Sehingga, tugas mengawal kedaulatan Indonesia di ALKI dan menciptakan stabilitas jangka panjang, supaya Indonesia dapat meraih manfaat kemakmuran yang optimal dari posisi geopolitik dan geostrategis yang baik, yang selama ini telah disediakan alam.

Jika dikaitkan dengan pengamanan IKN, Postur pertahanan saat ini masih belum memadai apabila dihadapkan pada lokasi Ibu Kota Negara berada di Pulau Kalimantan. Postur pertahanan masing-masing matra yang saat ini telah dibangun berpedoman pada *center of gravity* Indonesia adalah DKI Jakarta. Perencanaan penempatan alutsista yang sudah sangat memadai baru terbatas pada penggelaran radar pertahanan udara, karena disiapkan dalam

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ayers, James R. (1996). *Military Operation Other Than War in the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era*. Air Force Institute of Technology, Ohio: Wright-Patterson Air Force Base.
- Azwar, Saifuddin. (2016). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bartlet, H. C. (1995). *Naval War Collage Review; The Art of Strategy and Force Planning*, Newport. US Army Publishing
- Baylis, John. (2013). *Internasional and Global Security in Post-Cold War Era*, New York, Oxford University Press USA,
- Booth, Ken. (1977). *Navies and Foreign Policy*. London: Routledge sage publication
- Buzan, Barry. "People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post-Cold war era". London: Pinter. P187
- Ditjen PSDKP KKP. (2015). *Mina Bahari*. 2015, hlm 9.
- Geoffrey Till, *Seapower: Aguide for the Twenty-First Century*, (New York: Frank Cass Publisher, 2009).
- Harst, B. L. (2016). *Strategi*. Bradlley: Bradlley Potter.
- Huntington, Samuel. (1993). *New Contingencies, Old Roles, Joint Forces Quarterly*. Autumn.
- Helmi. (2011). *Teori Penggalan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- KJ. Holsti. (1981). *International Politics: A Framework of Analysis*. New Delhi: Prentice Hall
- Liddell Hart, B. H. (1967). *Strategy*. London. Faber. (2nd rev ed).
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tobing, J. (2016). *Strategi Militer*. Jakarta: Pusjianstra TNI.

JURNAL

- Ali, I. M., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(2).
- Ansori, Ikhsanudin, A. H., & Suhardono, E. (2017). Sinergi Bakamla dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 3 (3), 47-68. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view/139>.
- Arief, R., Midhio, I. W., Risman, H., Anwar, S., Prakoso, L. Y., & Arief Midhio, I Wayan, Risman, Helda, Anwar, Syaiful, and Prakoso, Lukman Yudho, R. (2021). Makassar War in the Perspective of the Indonesian Total War. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(J. Soc. Polit. Sci.), 230–238.
- Bunga, G. A. (2017). Pelanggaran Kedaulatan Indonesia Oleh Pesawat F-18 Hornet Milik Amerika Serikat (Ditinjau dari Konvensi Chicago Tahun 1944 dan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982). *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 8 (2), 62. <https://doi.org/10.28932/di.v8i2.724>.
- Faisal, Elvis, M. (2020). Implementasi Pengamanan Selat Sunda dalam rangka pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia *Jurnal Strategi Pertahanan Laut Volume 6 Nomor 1*.
- Herdiana, Dian. (2020). Menemukenali Syarat Keberhasilan Pindahan Ibu Kota Negara. *Politica Vol. 11 No. 1 Mei 2020*, Hal. 1-18.
- Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(1)
- Kharish, Lukman, Ikhwan Syahtaria, Dohar Sianturi, Lukman Yudho Prakoso, Herlina Juni Risma Saragih, Ernalem Bangun (2022) Strategi Gelar Kekuatan TNI Angkatan Laut Dalam Mengatasi Pelanggaran Di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Perairan Dalam Rangka Mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP), *Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2 No.8 Januari 2022*
- Katharina, Riris. (2020). Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Negara Baru. *Parliamentary Review*, Vol. II No. 2 (Juni 2020), Hal.51-59.
- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 5 (3). <https://doi.org/10.33172/spl.v5i3.642>
- Mahroza, Jonni. (2019). Pindahan Ibu Kota RI dari Perspektif Pertahanan, *Media Indonesia*, 04 September 2019.

- Ristawati, Fikri Hadi dan Rosa. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 3, September 2020, Hal. 531-557.
- Saputra, Surya Dwi, Thomas Gabriel J, dan Mhd Halkis. (2021). "Analisis Strategi Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara)". *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021, 192-220.
- Saraswati, A. L., & Pinatih, N. K. (2020). Strategi Keamanan Maritim Indonesia Terhadap Maritime Piracy Di Laut Sulu Tahun 2016. *Transformasi Global*, 7 (1), 114-43. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.01.6>.
- Suryawan, I. G., Ladjide, S., & Riyadi, S. F. (2021). Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Perwujudan Good Order At Sea: Studi Kasus Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Selat*, 8 (2), 149-58. <https://doi.org/10.31629/selat.v8i2.3537>.
- Susdarwono, E. T. (2020). Analisis Pertimbangan Pemindahan Ibukota NKRI Ke Kalimantan Timur Berdasarkan Deskripsi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Jurnal Sosial Politik Peradaban*, 1 (2), 25-35. <https://journal.peradaban.ac.id/index.php/jspp/article/view/630>.
- Rerangin, Indra Joko. (2023). Peningkatan Gelar Kekuatan TNI AL dalam Mengatasi Pelanggaran di Wilayah ALKI III Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Perairan. Universitas Pertahanan RI.
- Riptanto Slamet Hayat, & Syaiful Hasan (2023). Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Nasional Di Kalimantan Timur Guna Menghadapi Ancaman Militer Di ALKI II. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* Vol. 6, No. 4, October 2023
- Subagyo, Agus dan Udaya Madjid. (2019). Kaidah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan Pada Ibu Kota Baru Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, p-ISSN: 0216-4019 e-ISSN: 2614-025X, Volume 45, No. 2, Oktober 2019, Hal. 177-188.
- Suryawan, I Gde Padang, Suharto Ladjide, Sayed Fauzan Riyadi. (2021). Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam Perwujudan *Good Order At Sea*: Studi Kasus Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Selat* Volume. 8 Nomor. 2, Mei 2021. p - 2354-8649 | e - 2579-5767
- Sulo, Andi Fathurrachman Batara, Romie Oktovianus Bura, dan Sovian Aritonang. (2022) Pemanfaatan UAV Untuk Mendukung Pertahanan Udara IKN Nusantara Sebagai *Center Of Gravity*. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol.10 No.3 Edisi September 2022

- Syahmat, Muh. Zulfiquri. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, ISSN 2354-5798 (Print), 2654-5020 (Online), Vol. 7 No. 1 Juni Tahun 2019, Hal.44-61.
- Taufiq, Muhammad. (2020) Pindahan Ibu Kota Dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi. *Jurnal vokasi Indonesia*, Volume 8 Nomor 1, Januari – Juni 2020, P-ISSN 2355-5807, E-ISSN 2477 – 3433, Hal. 27-39.
- Toun, Nicodemus R. (2018). Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya. *Jurnal Academia Praja* Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018, Hal. 129-148.

UNDANG-UNDANG/PERATURAN:

- Kep Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang No 29 tahun 2007 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

WEBSITE/SUMBER INTERNET

- Adhi, I. S. (2023). Pengamat: Filipina Termasuk Pemasok Utama Senpi yang Dipakai KKB di Papua. Diakses dari: Kompas.com: <https://amp.kompas.com/global/read/2023/01/13/122800070/pengamat--filipinatermasuk-pemasok-utama-senpi-yang-dipakai-kkb-di-papua>. Diakses pada 10 Desember 2023
- Cipto, H. (2022). Polisi Selidiki Seaglider yang Ditemukan Nelayan di Kepulauan Selayar. Diakses dari, from Kompas.com: <https://makassar.kompas.com/read/2022/02/19/071110778/polisi-selidiki-seaglider-yangditemukan-nelayan-di-kepulauan-selayar?page=all>. Diakses pada 10 Desember 2023
- Dispen Komando Armada II. (2018). Struktur Organisasi Koarmada II. Diakses dari Koarmada II: <https://koarmada2.tnial.mil.id/>. Diakses pada 10 Desember 2023

- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2015). Ratifikasi Konvensi BWM, Komitmen Indonesia Lindungi Lingkungan Laut. Diakses dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: <https://dephub.go.id/post/read/ratifikasi-konvensi-bwm,-komitmenindonesia-lindungi-lingkungan-laut>. Diakses pada 10 Desember 2023
- Hakim, R. N. (2021). Temuan 'Drone' di Laut Indonesia dan Terancamnya Keamanan Nasional. Diakses dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/04/11500251/temuan-drone-di-lautindonesia-dan-terancamnya-keamanan-nasional>. Diakses pada 10 Desember 2023
- Indonesia Coast Guard. (2023). Diagram Kerentanan Maritim. Diakses dari Indonesia Maritime Information Centre: <https://imic.bakamla.go.id/>. Diakses pada 1 Desember 2023
- Koarmada II. (2018). Tugas Pokok. Diakses dari Dispen Komando Armada II: <https://koarmada2.tnial.mil.id/> Diakses pada 2 Desember 2023
- Simfoni PPA. (2022). Jenis Kekerasan yang Dialami Korban. Diakses dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses pada 10 Desember 2023

MENGAMANKAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA II

Pada tanggal 18 Januari 2022, rencana pemindahan Ibukota Negara disahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 dijelaskan bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Salah satu implikasinya adalah diperlukan strategi pertahanan dalam rangka melindungi Ibu Kota Nusantara tersebut. Mengingat adanya pemindahan Centre of Gravity, potensi ancaman di IKN, serta kondisi kemampuan kekuatan TNI itu sendiri. Masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana strategi gelar operasi TNI di ALKI II berdasarkan UU IKN No. 3 tahun 2022 dalam rangka pertahanan maritim guna menegakkan kedaulatan NKRI.